

**HUBUNGAN ANTARA MEKANISME *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) Tahun 2012-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro
Disusun oleh :

Fajar Gunawan

NIM. 12030111130176

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fajar Gunawan

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130176

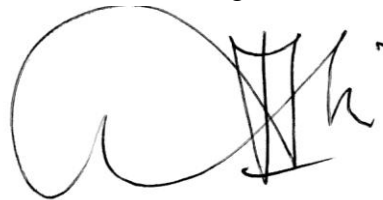
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **Hubungan Antara Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2013)**

Dosen Pembimbing : Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 4 September 2015

Dosen Pembimbing,



Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 1972 0421 200012 2001

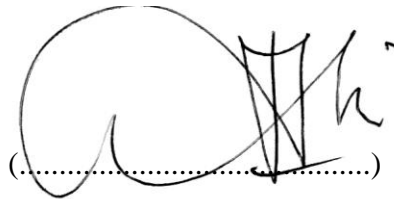
PENGESAHAN KELULUSAN

Nama Mahasiswa : Fajar Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130176
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY**
Dosen Pembimbing : Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji:

1. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt..



(.....)

2. Drs. Agustinus Santosa A. M.Si., Akt



(.....)

3. Adityawarman S.E. M.Acc., Akt



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fajar Gunawan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Hubungan Antara Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 September 2015

Yang membuat pernyataan,



Fajar Gunawan

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the characteristics of corporate governance such as independent board of commissioner, government ownership, managerial ownership, size of committee audit , the number of audit committee meeting, audit committee independence and the amount of audit committee professionals towards corporate social responsibility disclosure.

The population in this research covers all manufacturing companies that are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2012-2013. The determination on the sampling is conducted with purposive sampling method. The samples employed in this research are manufacturing companies that own annual reports during 2012-2013. The total amount of the samples is 232 companies consisted of the companies with variable data comprehensiveness for research need during 2012-2013. The technique of analysis used is multiple linear regression.

The analysis result shows that government ownership , size of committee audit, and the number of audit committee meeting give positive and significant influence toward corporate social responsibility disclosure, while independent board of commissioner, managerial ownership, audit committee interdependence, and the amount of audit committee professionals do not give any significant influence toward corporate social responsibility disclosure.

Keywords: *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, independent board of commissioner, government ownership, managerial ownership, size of committee audit , the number of audit committee meeting, audit committee independence and the amount of audit committee professionals*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari karakteristik *corporate governance* seperti dewan komisaris independen, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, Independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2013. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang memiliki ketersediaan laporan tahunan pada tahun 2012-2013. Total sampel yang digunakan adalah 232 perusahaan yang terdiri dari perusahaan yang memiliki kelengkapan data variabel untuk di teliti selama periode 2012-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah, ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, independensi komite audit dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, Independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

“Don’t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single step.”

“Mandiri Menghidupi”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak, Ibu, Insyad dan Rani.

Serta Orang-orang yang saya sayangi dan keluarga besar Akundip 2011.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada :

1. Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
3. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing yang sudah disiplin, sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen dan segenap staf atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama menempuh ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Orang tuaku tercinta, Bapak Joko Pramono dan Ibu Toniah yang selalu memberikan support, nasehat, kasih sayangnya dan doa yang diberikan selama menjalankan kuliah di Universitas Diponegoro.
6. Adik-adiku tercinta Irsyad dan Rani atas semangat yang telah diberikan untuk menjalankan masa kuliah di Universitas Diponegoro.
7. Erent Ersantika atas dukungan, perhatian dan semangatnya selama ini dalam menjalankan masa kuliah di Universitas Diponegoro.
8. Saudaraku satu kontrakan (Rian, Asep, Fafa,Jehan, Ibam, Putu, Elok, Lia dan Rajib) terima kasih sudah berjuang bersama dan menjadi seperti saudara

sendiri semasa menjalankan kuliah ini dan untuk Alm Angga tetap menjadi saudaraku, semoga tenang di dalam sana.

9. Anak-anak Gembel Akundip 2011 (Adit,Akmal,Alex, Alif, Alvine, Alwin, Axel, Anice, Bahrul, Bambo, Bang Jol, Bani, Best, Codot, Ciwul, Curem, Danan, Despa, Erika, Fafa, Faiz, Fika, Gati, Galuh, Habib, Hanif, Hasna, Hermas, Inug, Ical, Iis, kezia, Kosi, Lisa, Majid, Muadz, Nanang, Niko, Novita, Nutfi, O'O, Occi, Pepi, Pitri, Rainer, Reza Aul, Reja, Roy, Risha, Risky Bayu, Rusdan, Teteh, Ucup, Sulam, Tasya, Wempy) Telah bersama dalam menjalankan kegiatan kuliah, keseruan semasa kuliah tidak akan saya lupakan.
10. Fepala 22 (Risky, Ulin, Panji, Jojo, Nana, Tami, Amal, Limbong, Nora, Adit, Akbar, Wahid dan Brian) yang telah berjuang bersama dalam Diksar dan bercengkrama selama menjalankan program kerja Fepala.
11. Fepala Undip (Puji, hanif, Mas deni, Nasrun, Bebo, Pitrong, Yona, Nia) yang telah membimbing dalam menjalankan program kerja Fepala.
12. Voli FEB Undip (Wempy, Adit, Puji, Nanang, Syahid, Bangun, Bimo dan Habi) yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan UKM Voli di lingkungan FEB Undip.
13. Magelangers (Erent, Nia, Tala, Sakti, Dewi, Tami, Irawan, Teguh dan Rizal) yang telah menemani seperantauan semoga sukses semua.
14. Tim KKN Jambu Timur, Jepara (Rofiq, Lina, Tito, Rido, Radit, Rega, Wahyu, Dika, Laila, Topah, Siti, Ray dan Bang Robin) Perjuangan dan keseruan KKN tidak akan saya lupakan.
15. Bimbingan Bu etna (Bambo, Rusdan, Iis, Cahyo, Iput, Andrian, Panca, Alex, Nanang, Erpan, Isti, Julieta) yang sudah berdiskusi bersama semasa menjalankan tugas skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu,

kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINIALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Agensi(<i>Agency Theory</i>).....	14

2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i> (<i>Stakeholder Theory</i>).....	17
2.1.3 <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
2.1.3.1 Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i> .	18
2.1.3.2 <i>Corporate Sosial Responsibility Disclosure</i> .	19
2.1.4 <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.4.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.4.2 Dewan Komisaris Independen.....	27
2.1.4.3 Kepemilikan Pemerintah.....	28
2.1.4.4 Kepemilikan Manajerial.....	29
2.1.4.5 Ukuran Komite Audit.....	29
2.1.4.6 Jumlah Pertemuan Komite Audit...	30
2.1.4.7 Independensi Komite Audit.....	31
2.1.4.8 Keahlian Komite Audit.....	31
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	32
2.1.6 Perumusan Hipotesis.....	38
2.1.6.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	38
2.1.6.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> 39	
2.1.6.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan <i>corporate social responsiblity</i> 40	
2.1.6.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> 41	

	2.1.6.5 Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	42
	2.1.6.6 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	43
	2.1.6.7 Pengaruh Keahlian Komite Audit Terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> 44	
	2.1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	46
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
	3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	47
	3.1.1 Variabel Dependen.....	47
	3.1.2 Variabel Independen.....	48
	3.1.2.1 Dewan Komisaris Independen.....	48
	3.1.2.2 Kepemilikan Pemerintah.....	48
	3.1.2.3 Kepemilikan Manajerial.....	49
	3.1.2.4 Ukuran Komite Audit.....	49
	3.1.2.5 Jumlah Pertemuan Komite Audit..	49
	3.1.2.6 Independensi Komite Audit.....	50
	3.1.2.7 Keahlian Komite Audit.....	50
	3.2 Populasi dan Sampel.....	51
	Populasi.....	51

	Sampel.....	51
	3.3 Jenis dan Sumber Data.....	51
	3.4 Metode Pengumpulan Data.....	52
	3.5 Metode Analisis.....	52
	3.5.1 Statistika Deskriptif.....	52
	3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	52
	3.5.2.1 Uji Normalitas.....	53
	3.5.2.2 Uji Heterokesdatisitas.....	54
	3.5.2.3 Uji Multikolonieritas.....	54
	3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	55
	3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	56
	3.5.3.1 Koefisien Determinasi.....	57
	3.5.3.2 Uji T.....	57
	3.5.3.3 Uji F.....	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	59
	4.2 Analisa Data.....	60
	4.2.1 Statistika Deskriptif.....	60
	4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	64
	4.2.2.1 Uji Normalitas.....	64
	4.2.2.1.1 Screening Data.....	67
	4.2.2.2 Uji Heteroskesdatisitas.....	73
	4.2.2.3 Uji Multikolinieritas.....	74
	4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	76

4.3 Analisis Regresi Berganda.....	77
4.3.1 Analisis Korelasi.....	77
4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi.....	78
4.3.3 Analisis Uji F.....	79
4.3.4 Analisis Uji T.....	80
4.4 Pembahasan Hipotesis.....	83
4.4.1 Hipotesis 1.....	84
4.4.2 Hipotesis 2.....	85
4.4.3 Hipotesis 3.....	86
4.4.4 Hipotesis 4.....	87
4.4.5 Hipotesis 5.....	88
4.4.6 Hipotesis 6.....	89
4.4.7 Hipotesis 7.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Keterbatasan.....	93
5.3 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.1 Proses Purposive Sampling Penelitian.....	59
Tabel 4.2 Statistika Diskriptif.....	60
Tabel 4.3 One Kolmogorov Smirnov test	66
Tabel 4.4 One Kolmogorov Smirnov test CSR_DIS.....	68
Tabel 4.5 Identifikasi Outlier.....	68
Tabel 4.6 One Kolmogorov Smirnov test LN_CSRDIS.....	60
Tabel 4.7 Identifikasi Outlier setelah Screning Data.....	71
Tabel 4.8 One Kolmogorov Smirnov test setelah Screning Data	72
Tabel 4.9 Uji Glesjer.....	74
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas.....	75
Tabel 4.11 Uji Autokorelasi.....	76
Tabel 4.12 Analisi Korelasi.....	77
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi.....	78
Tabel 4.14 Analisis Uji F.....	79
Tabel 4.15 Analisis Uji T.....	80
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Statistik.....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	46
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	65
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	65
Gambar 4.3 Normalitas CSR_DIS.....	66
Gambar 4.4 Normalitas Kepemilikan Pemerintah.....	69
Gambar 4.5 Normalitas Kepemilikan Manajerial.....	69
Gambar 4.6 Normalitas LN_CSRDIS.....	70
Gambar 4.7 Normalitas setelah Screening Data.....	71
Gambar 4.8 Normalitas setelah Screening Data.....	71
Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Indeks GRI 3.1.....	99
Lampiran B Data Sampel Perusahaan Penelitian.....	104
Lampiran C Output SPSS.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimasa sekarang ini, dengan meningkatnya kesadaran publik akan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan kesadaran akan masyarakat yang memperhatikan aktivitas operasi perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tentu berdampak pada lingkungan sekitar dan masyarakat. Oleh sebab itu perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial yang harus diberikan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan perusahaan yaitu dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*.

Corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, serta masyarakat pada umumnya (Pasal 1 butir 3 UU No.40/2007 tentang PT). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan sangat penting dalam menginformasikan kegiatan operasi dalam bentuk CSR. Pengungkapan CSR menjadi sangat penting dilakukan karena sebagai sarana komunikasi tanggung jawab sosial pada pihak di luar perusahaan. Hal ini dikarenakan *stakeholder* tidak hanya melihat informasi dari keuntungan yang di dapat oleh

perusahaan saja, melainkan juga melihat pengungkapan informasi sosial yang dapat memberikan citra baik kepada perusahaan.

Informasi sosial merupakan salah satu informasi yang menarik bagi investor yang terdapat dalam laporan keuangan. Informasi tersebut meliputi hubungan perusahaan terhadap lingkungan, karyawan, keamanan produk dan terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hill, *et. al.* (Magdalena dan Herlina, 2008) menemukan fakta bahwa dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR mengalami kenaikan harga saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan berbagai perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR.

Corporate sosial responsibility muncul karena adanya kebutuhan dari perusahaan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Salah satu alasan mengapa perusahaan perlu melakukan CSR adalah adanya dampak lingkungan akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu dampak lingkungan yang terjadi akan kegiatan operasi perusahaan contohnya adalah PT Danone Aqua yang ditolak oleh masyarakat sekitar warga Desa Paladung, Kabupaten Karang Asem, Bali. Penolakan itu disebabkan warga sekitar tidak mau akan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Danone Aqua. Kondisi lain diperlihatkan di wilayah DKI Jakarta yang saat ini menjadi sorotan media, yaitu mengenai pemberian CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada Pemprov DKI Jakarta. Setelah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI Jakarta merangkul perusahaan untuk membantu membangun Jakarta. Pentingnya pengungkapan CSR yang ada dilaporan keuangan perusahaan menunjukkan perusahaan peduli akan lingkungan sekitar dan masyarakat. Hal ini juga menuntut

agar pelaku usaha tidak mencari keuntungan semata dalam menjalankan usahanya. Melainkan juga berkontribusi positif dalam kepedulian sosial dan masyarakat (CSR Indonesia Newsletter : 2013)

Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada mulanya hanyalah pengungkapan sukarela (*voluntary*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan, namun sekarang ini CSR menjadi salah satu hal yang wajib (*mandatory*) dilaporkan oleh perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan dibuatnya aturan yang menyangkut CSR Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 mewajibkan perusahaan untuk menguraikan kegiatan yang menyakut biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan pengeluaran untuk tanggung jawab sosial yang dilakukan menyangkut lingkungan dan masyarakat. Sedangkan peraturan mengenai pengungkapan atau *disclosure* itu sendiri diatur dalam keputusan BAPEPAM No. 02/PM/2002.

Penerapan CSR yang mulai ditanggapi baik oleh perusahaan di Indonesia menunjukkan peningkatan setelah munculnya kesadaran dari dunia industri akan pentingnya berkontribusi dalam lingkungan dan masyarakat. Pada tahun 2005 dalam penelitian yang dilakukan Suprpto (2006, dalam Sukarmi 2010) menunjukkan hasil survey terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Ini menunjukkan adanya peningkatan dari pelaku usaha akan pentingnya CSR bagi perusahaan. Selain itu hasil survey ini

menunjukkan adanya ketergantungan keseriusan dari pihak manajemen perusahaan sendiri untuk mengungkap kegiatan CSR (Sukarmi, 2010). Dari hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya keseriusan perusahaan dalam melaporkan kegiatan di sektor nonkeuangan walaupun pelaporan CSR sudah menjadi wajib (*mandatory*).

Salah satu upaya untuk menghasilkan pengungkapan CSR yang baik adalah adanya sokongan dari personel perusahaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan *good corporate governance* dengan baik. Sehingga dibuatlah Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang mewajibkan perusahaan yang menyelenggarakan pengelolaan yang baik. *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Dengan diterapkannya tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang baik akan menghasilkan pelaporan CSR yang baik pula. CSR bukan hanya menjadikan perusahaan memiliki nilai tambah. Pada intinya CSR yang dilaporkan pada laporan keuangan adalah satu kesatuan dari *Corporate Governance* (CG) karena keduanya adalah satu kesatuan bukan bagian terpisah yang harus disatukan (Murwaningsari, 2009).

Corporate Governance adalah prinsip untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang sifatnya untuk mengarahkan dan mengendalikan dalam melakukan pertanggung jawaban terhadap *stakeholder* (Komite Cadbury, 1992). Terdapat lima asas dalam menerapkan *good corporate governance* yaitu : *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Dengan

diterapkannya *corporate governance* perusahaan ingin meningkatkan kinerja perusahaan, dengan pengawasan dan pengendalian baik akan memberikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan berdasarkan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006).

Dalam praktik *corporate governance* terdiri dari beberapa elemen pembentuk didalamnya. Elemen- elemen pembentuk *corporate governance* diantaranya proporsi dewan komisaris independen dan komite audit sebagai pembantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya untuk pengawasan perusahaan (Said *et al.* 2009). Karakteristik komite audit yang diukur dengan ukuran komite audit, Jumlah pertemuan komite audit, komposisi dewan komisaris independen yang berada di komite audit dan ahli keuangan dalam komite audit (Rahmat *et al.*, 2009). Struktur kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan merupakan bagian elemen pembentuk *corporate governance* (Lammertjan, 2012).

Salah satu elemen pembentuk *corporate governance* adalah struktur kepemilikan perusahaan. Beberapa jenis kepemilikan yaitu kepemilikan pemerintah dan kepemilikan manajerial. Dalam teori agensi kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dan manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara peegang saham dan pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling,1976). Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajer berperan sebagai pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan. Ketika kinerja perusahaan menurun dan

pengungkapan kegiatan menurun maka manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan (Lammertjan, 2012).

Kepemiikan pemerintah adalah kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dimana perusahaan tersebut beroperasi. Dalam hal ini dimiliki pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah Indonesia. Adanya kepemilikan pemerintah direktur dapat dipilih dari kalangan pemerintah, menunjukkan adanya kepanjangan tangan dari pemerintah (Amran dan Devi, 2008). Dengan kata lain pemerintah memonitor perusahaan dalam setiap kegiatannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2008) mengemukakan kepemilikan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tingkat yang signifikansi yang baik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam pelaksanaan *corporate governance* peran dewan komisaris adalah sebagai pengawasan dan memonitor manajemen. Dalam sebuah perusahaan terdapat beberapa komisaris, diantaranya harus ada salah satu komisaris independen yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Dalam perspektif *agency theory* komisaris independen dipandang sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen (Rosenstain dan Wyatt, 1990 dalam Said *et. al*, 23 2009), yang nantinya dapat menghasilkan lebih banyak informasi pengungkapan sukarela perusahaan.

Dalam mekanisme *corporate governance* komite audit dapat berperan penting dalam menjalankan pengawasan. Tugas komite audit adalah pengendalian dan pengawasan dalam suatu perusahaan. Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-

29/PM/2004 tentang “Komite Audit” bahwa setiap perusahaan harus memiliki komite audit dalam satu struktur perusahaan. Dalam peraturan tersebut juga mewajibkan komite audit beranggota minimal tiga orang yaitu minimal satu orang komisaris independen yang juga berperan sebagai ketua komite audit, dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Salah satu anggota dari komite audit juga harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Handajani dkk 2008 dalam Rahmi memperlihatkan adanya hubungan positif komite audit dengan pelaporan CSR pada perusahaan. Jumlah komite audit pada perusahaan sangat membantu perusahaan dalam sistem pengawasan dan pengendalian.

Jumlah rapat yang diselenggarakan komite audit dapat memperlihatkan kinerja yang telah dilakukan oleh komite audit. Dengan semakin banyaknya komite audit melakukan pertemuan maka pengawasan yang ada di perusahaan akan berjalan dengan baik. *Abbott et al.* (2000) menemukan kehadiran komite audit setidaknya dua kali dalam setahun akan mengurangi tindak praktik kecurangan pada pelaporan keuangan.

Penjelasan di atas menunjukkan aktivitas pelaporan *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan tidak lepas dari praktik *Corporate Governance*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Said *et al.* (2009) mengenai hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Corporate Governance* pada perusahaan

yang terdaftar di Malaysia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran dewan komisaris independen, komite audit, dan konsentrasi terhadap CSR.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Said *et al.* (2009). Pada penelitian Said *et al.* (2009) menganalisis hubungan antara *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Corporate Governance*. Dengan *corporate governance* diwakili oleh variabel Ukuran Perusahaan, Ukuran Komisaris Independen, Duality, Komite Audit dan struktur kepemilikan. Dalam penelitian ini akan berfokus pada pengendalian internal perusahaan serta kepemilikan saham. Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tujuan membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Peraturan Bapepam LK no. IX 1.5 Bapepam- LK (2004) menyebutkan bahwa komite audit diperlukan pada perusahaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya komite audit yang bertugas sebagai pengawas internal perusahaan diharapkan dapat mengawasi dan memantau praktik *Corporate Governance* yang berjalan dengan baik, Sehingga dapat menghasilkan laporan CSR yang baik dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga ingin melihat apakah tipe kepemilikan yang berbeda setiap perusahaan akan mempengaruhi dalam pengungkapan CSR yang ada di perusahaan Indonesia. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi objek penelitian yang akan dilakukan, karena perusahaan manufaktur memproses barang dan dapat menghasilkan limbah yang berpengaruh pada lingkungan. Variabel yang akan digunakan meliputi Dewan Komisaris Independen,

Kepemilikan pemerintah, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit dan menambahkan beberapa variabel yang bersangkutan tentang komite audit. Variabel yang ditambahkan pada penelitian ini adalah Pengaruh Pertemuan Komite Audit, Keahlian Komite Audit dan Independensi Komite Audit. Penelitian ini penting dilakukan karena perusahaan di Indonesia pada kondisi rawan akan kurangnya kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Era modern serta kurangnya dalam menjaga lingkungan akan memberikan dampak negatif pada perusahaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas praktik pelaporan *Corporate Social Responsibility* sangat berpengaruh kepada kemauan manajemen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Corporate Governance*). Dengan adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” Bab V Pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, maka setiap perusahaan harus melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan nonkeuangan, seperti tanggung jawab sosial dan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Kegiatan pelaporan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) adalah salah satu konsekuensi praktik *Corporate Governance*. Dalam tata kelola perusahaan yang baik di perlukan adanya suatu pengawasan yang baik di pihak internal perusahaan. Praktik *Corporate Governance* yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula. Dimana dengan hal tersebut investor dapat melihat sebagai perusahaan yang baik.

Keterbukaan perusahaan dalam menginformasikan dapat diartikan perusahaan mempunyai laporan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Keterbukaan informasi seperti polusi udara dan air dapat berdampak baik untuk perusahaan. Sedangkan informasi mengenai pemulihan lingkungan yang tercemar akibat kegiatan operasi perusahaan juga bisa berdampak baik dikarenakan memperlihatkan perusahaan peduli akan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial) oleh perusahaan didasarkan dengan kegiatan yang sudah dijalankan. Akan tetapi saat ini terdapat beberapa fakta bahwa adanya ketidaksesuaian informasi dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada laporan keuangan mengenai kinerja yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut kegiatan lingkungan dan masyarakat. Hal ini menyebabkan masih ada banyak pihak yang meragukan informasi *Corporate Social Responsibility* yang dilaporkan oleh perusahaan pada laporan keuangan.

Dengan adanya keseriusan manajemen untuk mengawasi secara internal dan menggunakan praktik *Corporate Governance* yang baik maka diharapkan dalam pelaporan yang akan disampaikan kepada *stakeholder*, investor dan masyarakat akan menghasilkan laporan yang baik dan dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini akan dipermudah dengan menjabarkannya kedalam pertanyaan masalah yaitu:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?

2. Apakah Kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
4. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
5. Apakah Jumlah Pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
6. Apakah Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?
7. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

4. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.
5. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Jumlah Pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.
6. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.
7. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan literature bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dan memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemilik perusahaan untuk mengetahui pengaruh pentingnya implementasi mekanisme *good corporate governance* untuk menghasilkan pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan yang dipilih dalam penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi (*Agency Theory*) menjelaskan tentang adanya hubungan antara dua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi principal dan pihak yang lain bertindak sebagai agen (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Teori Agensi menjelaskan adanya hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Yang dimaksudkan dengan prinsipal disini adalah investor atau pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan agen disini adalah yang dipekerjakan atau manajemen perusahaan. Pihak prinsipal disini sebagai pemberi kerja memiliki kepentingan untuk mendapatkan untung dengan mempekerjakan agen yaitu manajemen. Pihak agen disini yang diberi pekerjaan bertanggung jawab akan pengelolaan perusahaan. Manajemen juga dapat mengambil keputusan bisnis untuk berkelanjutan perusahaan. Secara tidak langsung dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut akan memicu adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan disebabkan adanya asimetris informasi. Asimetri informasi terjadi ketika manajer sebagai pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan

stakeholders sebagai pihak eksternal. Dengan adanya hubungan kontrak kedua belah pihak maka terjadinya manipulasi untuk meningkatkan utilitas masing-masing sangat mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) potensi konflik kepentingan bisa terjadi di antara pihak-pihak yang berhubungan seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan (*agency costs of equity*) atau antara pemegang saham dengan kreditur (*agency costs of debt*). Menurut mereka *agency cost* itu meliputi tiga hal, yaitu *monitoring costs*, *bonding costs* dan *residual loss*. *Monitoring costs* merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Dalam situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding costs*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut.

Ada tiga asumsi yang melandasi teori agensi yaitu, Asumsi sifat manusia, Sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), lalu manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi tentang keorganisasian, Dalam suatu organisasi terdapat konflik antar anggota organisasi dan efisiensi sebagai kriteria produktivitas, serta asimetri informasi antara pihak manajer dengan pemilik. Asumsi tentang Informasi, Informasi dipandang oleh perusahaan sebagai komoditas

yang diperjualbelikan sehingga dapat memengaruhi kualitas pengungkapan informasi (Eisenhardt, 1989).

Teori Agensi merupakan konsep yang mendasari praktik *Corporate Governance* dan fungsinya sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Selain itu, pemegang saham atau pemilik perusahaan dapat yakin bahwa agen tidak akan melakukan kecurangan yang akan mensejahterakan pihak agen dan *corporate governance* dapat meminimalkan biaya keagenan yang dikeluarkan pemegang saham (Alfia, 2013).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan praktik *corporate governance*. Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara agen yaitu manajemen dan principal yaitu pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Agen yang diberi wewenang oleh pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaan harus dapat memuaskan pemegang saham. Dengan pemegang memilih agen yang memiliki kompetensi yang baik dalam praktik *corporate governance* akan menghasilkan kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik pada akhirnya manajemen akan menghasilkan laporan pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik. Sehingga pertanggung jawaban yang di berikan kepada pemilik perusahaan akan menghasilkan laporan yang mencerminkan kegiatan perusahaan.

2.1.2 Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*) berbeda dengan teori agensi karena hubungan antara dua pihak lebih menekankan pada hubungan perusahaan dan *stakeholder* yang ada dalam internal dan eksternal perusahaan. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) teori *stakeholder* menjelaskan bahwa suatu perusahaan atau organisasi tidak hanya beroperasi untuk dirinya sendiri tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*-nya. Hal ini menunjukkan perusahaan atau organisasi tidak bisa lepas dari lingkungan dan sekitarnya. Diharapkan dengan adanya dukungan dari *stakeholder* akan memberikan dampak positif pada operasi perusahaan. Sedangkan jika tidak adanya dukungan dari para *stakeholder* maka dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif untuk perusahaan.

Teori *Stakeholder* mengidentifikasi bahwa adanya dua kategori pemangku kepentingan, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Bagian dari lingkungan internal yaitu pemilik perusahaan, karyawan, konsumen dan pemasok. Sedangkan yang dimaksud lingkungan eksternal terdiri dari pemerintah, kompetitor, advokasi, konsumen, pemerhati lingkungan, *Special Interest Group* (SIG), dan media (Freeman, 1984).

Sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para *stakeholder* dengan memberikan sebuah laporan yang transparan, akuntabel dan informatif. Laporan ini dapat memberikan manfaat agar para *stakeholder* dapat mengetahui operasi perusahaan dan dapat menilai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu perusahaan dapat melakukan analisis *stakeholder* sehingga

dapat mengetahui kebijakan apa yang akan diambil oleh perusahaan. Analisis pemangku kepentingan mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang relevan, kepentingan pemangku kepentingan, kekuatan pemangku kepentingan, dan koalisi pemangku kepentingan (Warsono, 2009).

Berdasarkan penjelasan teori *stakeholder* diatas, hubungan antara praktik *corporate governance* dan *corporate social responsibility* dapat dijelaskan oleh teori ini. Hill dan Jones (1992) berpendapat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan mempengaruhi semua pemangku kepentingan kelompok, dalam hal ini manajer dapat dilihat sebagai agen dari *stakeholder*, tidak hanya sebagai agen dari pemegang saham.

2.1.3. Corporate Social Responsibility

2.1.3.1. Definisi Corporate Social Responsibility

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD, 2000) Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjajanya beserta seluruh keluarganya. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis , yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain: (a) tanggungjawab dasar (*basic responsibility*), tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya, kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham; (b) tanggungjawab organisasi (*organizational responsibility*), tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat; (c) tanggung jawab sosial (*societal responsibility*), tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis, dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh, serta berkembang secara berkesinambungan. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu diungkapkan oleh perusahaan agar informasi mengenai kegiatan tanggungjawab sosial yang lebih transparan untuk masyarakat, atau pemangku kepentingan (Gray, *et.al.* 1987).

2.1.3.2. Corporate Social Responsibility Disclosure (Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial)

Dalam rangka menciptakan *Good Corporate Social Responsibility* harus memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility* secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut (Marnelly, 2012). Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi

perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray, *et.al.*, 1987).

Pengungkapan informasi dibutuhkan oleh semua perusahaan untuk mendapatkan fungsi secara optimal. Informasi yang diungkapkan dapat berguna untuk kepentingan perusahaan dan investor. Perusahaan dapat mendapat keuntungan berupa investasi dari investor. Sedangkan investor mendapat keuntungan mendapatkan deviden hasil investasi yang diberikan pada perusahaan. Namun pengungkapan informasi tidak hanya soal mendapatkan dana investasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000).

Menurut Belkaoui (2000) tujuan dilakukan pengungkapan antara lain:

1. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
2. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
3. Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang

peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Pada pernyataan diatas tidak disebutkan perusahaan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang menyangkut tanggung jawab sosial. Disini melihat bahwa pada tahun 2004 pengukapan CSR di Indonesia masih berlaku sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan sosialnya dalam laporan keuangan mengakibatkan menariknya perhatian publik. Namun dalam faktanya perusahaan ada yang bersungguh sungguh untuk melaporkan kegiatan sosialnya dengan pedoman-pedoman yang telah ada. Beberapa alasan mengapa perusahaan mau melakukan pengukapan sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat secara sukarela (*Voluntary*), Menurut (Deegan, 2002):

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*).
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman.
5. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
6. Untuk mengendalikan kelompok *stakeholder* tertentu yang berpengaruh kuat (Ullman 1985; Roberts 1992; Evan dan Freeman 1988; Neu *et.al.*, 1998)
7. Untuk mematuhi persyaratan industri. Misalnya, di Australia, Industri pertambangan memiliki *Code for Environmental Management* sehingga ada tekanan tertentu untuk memenuhi aturan tersebut.
8. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

Corporate Social Responsibility yang dulunya bersifat sukarela untuk diungkapkan (*Voluntary Disclosure*) berubah menjadi wajib untuk diungkapkan (*Mandatory Disclosure*) bagi perseroan terbatas. Pada tahun 2007, pemerintah mengesahkan Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu UU No 40 th. 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan mengenai kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya sebagai suatu bentuk komitmen perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial ini juga terdapat dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-38/PM/1996 peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berisi mengenai kebebasan bagi

perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan umum tersebut dapat berisi uraian mengenai keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainnya serta uraian mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan SDM.

Pengungkapan sosial dan lingkungan bisa dikelompokkan menjadi beberapa elemen. Menurut Zhegal & Ahmed (1990) dalam Pratama (2013) pelaporan sosial perusahaan dapat diidentifikasi dalam beberapa elemen :

1. Lingkungan

Elemen ini meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan

2. Energi

Elemen ini meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.

3. Praktik Bisnis yang Wajar

Elemen ini meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.

4. Sumber Daya Manusia

Elemen ini meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan seni.

5. Produk

Elemen ini meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

Salah satu indikator mmenilai CSR suatu perusahaan dengan menggunakan indek yang ditetapkan oleh *Global Reporting Intiative* (GRI). Organisasi ini berbasis melaporkan perkembangan dunia. Ada tiga fokus pengukapan yang dilakukan dengan indikator yang dikeluarkan oleh GRI:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
3. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*)

2.1.4 Corporate Governance

2.1.4.1 Definisi Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* sudah diperkenalkan sejak lama sebagai salah satu bentuk sistem pengelolaan yang baik bagi perusahaan. Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan diawasi. Struktur tata kelola perusahaan menentukan pendistribusian hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam korporasi, seperti dewan, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur pengambilan keputusan pada urusan perusahaan. Dengan melakukan ini, juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja.

Corporate Governance pada tahun 1992 diperkenalkan untuk pertama kalinya. *Cadbury Committee* memperkenalkan sistem baru untuk mengelola suatu organisasi. Dengan sitem yang diperkenalkan diaanggap sebagai tolak ukur untuk praktik

corporate governance (tata kelola perusahaan) di seluruh dunia. *Cadbury Report*, mendefinisikan *corporatae governance* adalah:

“Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. agar mencapaikeseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, Manajer, pemegang saham dan sebagainya.”

Sedangkan menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002). Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Secara teoritik, praktek *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Secara umum *corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengendalikan perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholders* sehingga

dapat menciptakan efisiensi serta meningkatkan kepercayaan investor (Bodroastuti, 2009).

Good Corporate Governance telah dijadikan sebagai sistem yang universal untuk mengelola suatu perusahaan di seluruh dunia. Hubungan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik akan menghasilkan praktik *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik). Hal tersebut sesuai dengan konsep GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pratama, 2013)

Lima asas *Good Corporate Governance* yang tercantum dalam *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* tahun 2006, yaitu (KNKG, 2006):

1. *Transparency* (Transparansi)

Obyektivitas dalam menjalankan bisnis harus dijaga. Perusahaan harus membuat informasi yang mudah dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan (stakeholder). Perusahaan juga harus menginformasikan informasi-informasi yang bersifat untuk pengambilan kebijakan oleh semua pengguna informasi seperti pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Pertanggung jawaban yang harus dilaporkan oleh perusahaan atas kinerja yang telah dilakukan harus transparan dan wajar. Pengelolaan harus dilakukan secara benar sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Dalam pengelolaan perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.

4. *Independency* (Independensi)

Pengelolaan perusahaan secara independen sehingga tidak didominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sehingga dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Asas kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatan harus diterapkan oleh setiap perusahaan yang melakukan praktik corporate governance.

2.1.4.2 Dewan Komisaris Independen

Dalam struktur perusahaan dewan komisaris terdiri juga atas dewan komisaris independen. Dalam hal ini dewan komisaris independen merupakan orang luar dari perusahaan yang dipilih secara transparan dan independen (diperjakan dengan profesional dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan). Memiliki integritas, transparan dan bertindak secara independen tidak mementingkan kepentingan kelompok.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 dijelaskan dewan komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris. Dewan komisaris terdiri dari satu orang atau lebih yang tugasnya sesuai anggaran dasar, serta memberikan nasehat terhadap direksi. Dewan komisaris tidak melakukan pekerjaan secara sendiri. Namun, keputusan yang diambil adalah keputusan dewan komisaris. Menurut Said *et, al.* (2009) dewan komisaris independen memerankan peranan penting dalam perusahaan. Meningkatkan citra sebuah perusahaan dan mengawasi kinerja manajemen.

2.1.4.3 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah yang dimaksud disini adalah besarnya saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan pemerintah jabatan direktur perusahaan dapat dijabat oleh orang yang ditunjuk langsung pemerintah. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Diberbagai Negara pemerintah dengan berinvestasi di perusahaan dapat secara eksplisit bertujuan ikut menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta kondisi sosial (OECD, 2004).

Bagi masyarakat, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan good corporate governance. Di Indonesia perusahaan ini disebut dengan BUMN. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga stakeholder utama perusahaan ini adalah pemerintah. BUMN dalam menjalankan operasional perusahaannya berpedoman kepada perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, Selain itu BUMN akan

mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta.

2.1.4.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial yang dimaksud disini adalah jumlah besarnya saham perusahaan yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Melalui kepemilikan manajerial setiap karyawan merasa memiliki perusahaan dan ingin bekerja untuk memajukan perusahaan. Ketika kinerja dari suatu perusahaan menurun dan pengukapan kinerja sosial juga tidak maksimal maka karyawan akan bekerja lebih intensif untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Lammertjan, 2012).

Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan yang dimiliki oleh manajer dan karyawan lain memiliki kinerja yang baik . karena dalam prakteknya semua karyawan ingin mendapatkan keuntungan. Dengan kepemilikan yang dimiliki oleh manajer dan karyawan, manajer akan melakukan control dengan baik agar perusahaan dapat mencapai kinerja maksimal (Mohd Nasir dan Abdullah, 2004).

2.1.4.5 Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah bagian dari corporate governance yang bertugas untuk membantu kinerja dari dewan komisaris. Keberadaan Komite Audit di Indonesia diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Tugas dari komite audit adalah pengendalian dan pengawasan dalam suatu perusahaan.

Menurut Surat edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan,
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,
- c. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit,
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Komite Audit disini dituntut dari pihak-pihak yang mempunyai integritas dan independen dalam mengambil sebuah kebijakan. Karena tugas dan wewenang komite audit sebagai pengawasan dan pengendalian suatu perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk setiap kebijakan yang akan diambil memiliki integritas untuk dipertanggung jawabkan dan dilaporkan. Dengan komite audit yang memiliki sifat independen dimaksudkan tidak memihak kepentingan dalam menyikapi suatu masalah.

2.1.4.6 Jumlah Pertemuan Komite Audit

Peran aktif komite audit dapat dilihat dari jumlah pertemuan yang digelar selama setahun. Pertemuan komite audit adalah jumlah pertemuan yang diadakan oleh anggota komite audit dalam setahun. Peran aktif anggota merupakan bagian paling penting pada efektivitas komite audit. Tanpa adanya peran aktif dari tiap-tiap anggota, maka keahlian, independensi, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki oleh komite audit tidak akan menghasilkan kinerja yang memuaskan. Walaupun peraturan BAPEPAM tahun 2004 tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak

pertemuan yang harus diadakan, namun peraturan tersebut menetapkan bahwa komite audit wajib menyerahkan laporan kegiatan mereka kepada Dewan Komisaris secara periodik minimal sekali dalam tiga bulan.

2.1.4.7 Independensi Komite Audit

Dalam komite audit terdapat juga komite audit independen. Yang dimaksudkan disini adalah anggota komite audit yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan. Sehingga fungsi pengendalian dan pengawasan berjalan dengan baik. Di dalam komite audit terdapat komite audit independen. Komite independen menunjukkan proporsi komite audit independen dalam susunan komite audit.

Komite audit independen adalah syarat berjalannya kinerja yang efektif dari komite audit. Keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX 5 Tahun 2004, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua anggota luar emiten atau perusahaan publik. Dengan adanya komite audit independen pelaporan keuangan pada pihak yang berkepentingan dapat diandalkan McMullen and Raghunandan (1996).

2.1.4.8 Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit adalah kemampuan yang dimiliki anggota komite audit dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Dalam salah satu tugasnya yang tercantum dalam peraturan Bapepam No. IX 5 adalah menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan

Publik. Dengan hal itu maka diperlukan keanggotaan komite audit setidaknya memiliki keahlian di bidang akuntansi dan manajemen keuangan.

Carcello *et. al.* (2008) mendefinisikan keahlian keuangan adalah memiliki (a). Pemahaman atas GAAP dan laporan keuangan, (b). Pengalaman mengaplikasikan GAAP dalam hubungannya dengan estimasi untuk akuntansi, akrual, dan penyajian laporan keuangan (c). Pengalaman dalam persiapan atau pengauditan laporan keuangan terbitan yang dapat dibandingkan secara umum; (d). Pengalaman dengan kontrol internal akuntansi; dan (e). Pemahaman fungsi komite audit.

Keberadaan komite audit secara langsung memberikan dampak yang baik dalam mengungkapkan CSR (Ho and Wong, 2001). Dalam meningkatkan tugas pengawasan dan keefektifan kinerja keberadaan ahli keuangan dalam komite audit sangat membantu dalam pekerjaan. Kecurangan dalam melaporkan laporan keuangan berbanding negative dengan keahlian yang dimiliki komite audit (Abbott, dkk, 2004).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengaitkan *Corporate Governance* dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sudah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian ini telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di berbagai Negara. Penelitian CSR dan CG telah dilakukan sejak lama, namun isu ini menjadi menarik untuk diteliti karna menyangkut dengan kegiatan social dan menyangkut dengan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lammertjan Dam dan Bert Scholtens (2012) untuk menganalisis *corporate governance* yang diwakili oleh tipe kepemilikan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Bank, Kepemilikan Perusahaan, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Individu. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan yang ada di eropa. Lebih dari 600 perusahaan yang ada di eropa, terdiri dari 16 negara dan 35 industri. Variabel penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan *regression* yaitu Kepemilikan karyawan, Individu dan Perusahaan berpengaruh negative pada pengukapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan penemuan yang lain, Kepemilikan Bank, Institusional dan pemerintah bersifat netral terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Roshima Said, Yuserrie Hj Zainuddin and Hasnah Haron (2009). Penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Corporate Governance* di perusahaan Malaysia. Variabel *Corporate Governance* disini diwakili oleh Ukuran Perusahaan, Ukuran Komisaris Independen, Duality, Komite Audit, Kosentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing. Variabel dependen dari penelitan ini adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Penelitian ini menggunakan *Regression* yaitu Hanya dua variabel yang menunjukkan pengaruh positif terhadap pengukapan *Corporate Social Responsibility* yaitu variabel kepemilikan pemerintah dan komite audit. Variabel kepemilikan pemerintah menunjukkan tingkat signifikansi yang baik pada pengukapan *Corporate Social*

Responsibility. Sedangkan variabel lain menunjukkan pengaruh yang negative terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Richa Puspita Afilia dan Arifin Sabeni (2013). Penelitian ini menganalisis tentang Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam Sustainability Report. Variabel Independen pada penelitian ini adalah *corporate governance* yang diwakili oleh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Publik. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2012. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan *regression* yaitu menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam *sustainability report*. Sedangkan variabel lain tidak memiliki signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *sustainability report*.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rachmanda dan Fuad (2014). Penelitian ini menganalisis tentang mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Variabel Independen pada penelitian ini adalah corporate governance yang diwakili oleh dewan komisaris independen, struktur *Chief Risk Officer* (CRO), kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, serta komite nominasi dan remunerasi. Sedangkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan sebagai variabel dependen diukur menggunakan jumlah item pengungkapan sesuai dengan

indeks *Global Reporting Initiative* (GRI). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. Hasil dari penelitian ini berdasarkan regresi berganda yaitu menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Hasil lain mencatatkan bahwa struktur CRO, kepemilikan manajerial, serta komite nominasi dan remunerasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Sedangkan ukuran dewan direksi, independensi komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel		Hasil Penelitian
	Dependen	Independen	
Lammertjan Dam dan Bert Scholtens (2012)	<i>Corporate Social Responsibility</i>	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Bank, Kepemilikan Perusahaan, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Individu	Kepemilikan karyawan, Individu dan Perusahaan berpengaruh negative pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. Sedangkan penemuan yang lain, Kepemilikan Bank, Institusional dan pemerintah bersifat netral terhadap Corporate Social Responsibility.

Lanjutan Tabel 2.1

Roshima Said, Yuserrie Hj Zainuddin and Hasnah Haron (2009)	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Ukuran Perusahaan, Ukuran Komisaris Independen, Duality, Komite Audit, Kosentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing.	Variabel kepemilikan pemerintah menunjukkan tingkat signifikansi yang baik pada pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Sedangkan variabel lain menunjukkan pengaruh yang negative terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Richa Puspita Afilia dan Arifin Sabeni (2013)	<i>Corporate Social Responsibility</i>	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Publik	kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam <i>sustainability report</i> . Sedangkan variabel lain tidak memiliki signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam <i>sustainability report</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

Andi Rachmanda dan Fuad (2014)	Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan	struktur <i>Chief Risk Officer</i> (CRO), kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, independensi komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, serta komite nominasi dan remunerasi.	proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. struktur CRO, kepemilikan manajerial, serta komite nominasi dan remunerasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. dewan direksi, independensi komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi social
--------------------------------	--	---	---

Berdasarkan Penelitian terdahulu peneliti memodifikasi penelitian Said *et, al.* (2009) , Lammertjan Dam dan Bert Scholtens (2012) dan Rachmanda (2014). Peneliti menggunakan variabel Independensi dewan komisaris dan komite audit dari Said *et, al.* (2009). Variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah dari Lammertjan Dam dan Bert Scholtens (2012) dan menggunakan pengukuran *Corporate Social Responsibility* menggunakan indeks yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Peneliti juga menambahkan variabel jumlah pertemuan komite audit, Independensi komite audit dan keahlian komite audit. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh hubungan antara pengendalian internal

yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini komite audit dengan pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.1.6 Perumusan Hipotesis

2.1.6.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Menurut teori agensi adanya hubungan antara dua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi principal dan pihak yang lain bertindak sebagai agen. Tugas dewan komisaris adalah memberikan pengawasan dan saran kepada direksi untuk melaksanakan praktik *Corporate Governance* dengan baik (KNKG, 2006). Oleh karena itu dewan komisaris dapat memberikan saran dan pengawasan pada direksi untuk melaporkan kegiatan pelaporan CSR untuk dilaporkan dengan baik. Dalam perspektif *agency theory* komisaris independen dipandang sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen (Rosenstain dan Wyatt, 1990 dalam Said *et. al*, 23 2009), yang nantinya dapat menghasilkan lebih banyak informasi pengungkapan sukarela perusahaan.

Pada teori *stakeholder*, pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk CSR adalah salah satu informasi yang dapat memberikan penjelasan kepada *stakeholder*. Teori stakeholder menjelaskan bahwa suatu perusahaan atau organisasi tidak hanya beroperasi untuk dirinya sendiri tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Dewan komisaris terdiri dari satu orang atau lebih yang tugasnya sesuai anggaran dasar, serta memberikan nasehat terhadap direksi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 dijelaskan dewan komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris.

keputusan yang diambil adalah keputusan dewan komisaris. Menurut Said *et, al.* (2009) dewan komisaris independen memerankan peranan penting dalam perusahaan. Meningkatkan citra sebuah perusahaan dan mengawasi kinerja manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut, dewan komisaris yang bertindak sebagai agen dan diberi tugas oleh pemilik perusahaan dapat membuat kebijakan dalam perusahaan. Dengan kata lain pemilik perusahaan atau principal dapat memberikan tanggung jawab kepada komisaris. Dengan menunjuk orang yang independen dalam posisi komisaris dapat memberikan rasa aman bagi pemilik perusahaan. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.1.6.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah perusahaan harus menjalankan perusahaan mengikuti keinginan pemerintah dan perundang-undangan. Adanya kepemilikan pemerintah direktur dapat dipilih dari kalangan pemerintah, menunjukkan adanya kepanjangan tangan dari pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Menurut teori *stakeholder* adalah salah satu pihak yang berkepentingan dan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung atas aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Begitu juga Pihak principal yaitu pemilik perusahaan dalam teori agensi adalah pemilik saham dari perusahaan. Masalah keagenan terjadi ketika manajemen perusahaan memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan pemilik

perusahaan yang seringkali mengutamakan kepentingan pribadi dari pihak manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan kata lain pemilik perusahaan dapat mempengaruhi arah kebijakan perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara atau yang sering disebut BUMN mendapat sorotan dari perusahaan. Karena masyarakat berpendapat bahwa perusahaan yang dimiliki Negara memiliki pengelolaan yang baik terhadap semua aspek termasuk juga dalam kegiatan sosial masyarakat dan lingkungan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Said *et. al.* (2009) dan (Amran dan Devi, 2008) kepemilikan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tingkat yang signifikansi yang baik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.1.6.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh dewan komisaris, manajer dan direksi dalam perusahaan tersebut. Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) kepemilikan manajerial dapat mengatasi masalah keagenan serta menyelaraskan kepentingan *stakeholder* dan manajemen sebagai agen.

Menurut teori *stakeholder* sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para *stakeholder* dengan memberikan sebuah laporan yang transparan, akuntabel dan informatif. Dengan kepemilikan manajerial

manajer dan direksi akan berperilaku tidak mementingkan keinginan sendiri dan lebih mementingkan kepentingan perusahaan. Semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan deviden dari saham yang ditanamkan. Salah satunya dengan cara pengungkapan CSR yang baik dan meningkatkan citra perusahaan (Gray, *et. al.* (1988) dalam Afilia (2013)).

Penelitian yang dilakukan oleh Afilia (2013) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.1.6.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Tugas dari komite audit adalah pengendalian dan pengawasan dalam suatu perusahaan. Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang “Komite Audit” bahwa setiap perusahaan harus memiliki komite audit dalam satu struktur perusahaan. Komite audit berada di bawah dewan komisaris karena dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu secara pengawasan dan pengendalian. Serta memberikan saran kepada dewan komisaris dan memberikan rekomendasi. Teori *stakeholder* menunjukkan dengan komite audit menjalankan tugasnya secara baik maka akan fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik serta menghasilkan laporan CSR yang baik pula. Dengan begitu ada informasi yang diberikan pada pengguna *stakeholder* sebagai pertanggung jawaban.

Teori Agensi merupakan konsep yang mendasari praktik *Corporate Governance* dan fungsinya sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Dengan adanya komite audit pemilik saham menjadi lebih merasa aman karena adanya pengawasan dari internal perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Handajani dkk (2008) memperlihatkan adanya hubungan positif komite audit dengan pelaporan CSR pada perusahaan. Jumlah komite audit pada perusahaan sangat membantu perusahaan dalam sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.1.6.5 Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam teori agensi, komite audit selaku yang mewakili dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dari pengawasan dan pengendalian agar para manajer dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan diri sendiri dan tidak merugikan perusahaan. Dengan pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan ada kinerja dari komite audit untuk mengawasi dan pengendalian perusahaan. Dengan komite audit menjalankan tugas dengan baik maka akan fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik

serta menghasilkan laporan CSR yang baik pula. Dengan begitu ada *good news* yang diinformasikan pada *stakeholder*. Menurut teori stakeholder masyarakat adalah salah satu pihak yang berkepentingan atas aktivitas operasi perusahaan. Karena menyangkut dengan dampak lingkungan sekitar yang ditimbulkan atas aktivitas operasi perusahaan (Freeman, 1984).

Penelitian yang dilakukan Beasley *et al.* (1999) menemukan bahwa komite audit perusahaan umumnya bertemu setahun sekali. Mereka juga menemukan terjadi kecurangan bila perusahaan tidak memiliki komite audit. Sedangkan Abbott *et al.* (2000) menemukan kehadiran komite audit setidaknya dua kali dalam setahun akan mengurangi tindak praktik kecurangan pada pelaporan keuangan.

Oleh karena itu dengan diadakanya pertemuan komite audit dengan intensitas banyak akan semakin menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh komite audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5 : Jumlah Pertemuan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.1.6.6 Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Komite audit independen berada dalam satu kesatuan komite audit dibawah dewan komisaris. Dengan komite audit independen pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan diharap tidak mementingkan kepentingan sendiri dan

mementingkan keperluan perusahaan. Jumlah komite audit independen dalam sekurang kurangnya terdapat satu komite audit independen.

Komite audit independen sebagai kepanjangan tangan komisaris bertindak sebagai agen. Dalam hal ini legitimasi perusahaan dapat diandalkan oleh independensi komite audit dalam melakukan pengungkapan informasi CSR. Dalam teori *stakeholder* perusahaan yang diwakili komite audit yang bertugas sebagai pengawas berusaha untuk memberikan pertanggung jawaban yaitu berupa informasi. Dalam bentuk laporan keuangan para *stakeholder* informasi dapat menjelaskan aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan pengungkapan CSR yang baik oleh perusahaan maka akan memberikan *good news* kepada pengguna informasi.

Beasley *et. al.* (1999) menemukan bahwa 38% perusahaan yang mengalami fraud adalah anggota komite audit yang seluruhnya dari *outside commissioner*. *outside commissioner* adalah anggota yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Oleh karna itu dengan jumlah komite audit independen banyak akan semakin tugas pengawasan dan pengendalian yang baik dan tidak ada intervensi oleh pihak pihak lainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6 : Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.1.6.7 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam komite audit diperlukan anggota dengan memiliki kemampuan terhadap bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan tentang laporan keuangan. Dengan anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan kecurangan saat melaporkan keuangan dapat diminimalisir. Oleh karena itu anggota komite audit harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi agar pengawasan berjalan efektif.

Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan (*decision making*) kepada *agent* yang dapat diartikan pula bahwa *principal* memberikan suatu amanah, tugas, tanggung jawab kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Jensen dan Meckling, 1976). Selaras dengan teori *stakeholder* agen yang ditunjuk untuk menginformasikan pengungkapan *corporate social responsibility* dengan baik pada laporan tahunan adalah yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan.

Davidson *et. al.* (2004) menunjukkan signifikansi positif terhadap harga saham. Menunjukkan investor percaya akan pelaporan keuangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Raghundan *et. al.* (2001) dalam Huang dan Thiruvadi (2010), menemukan bahwa komite audit terdiri setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi.

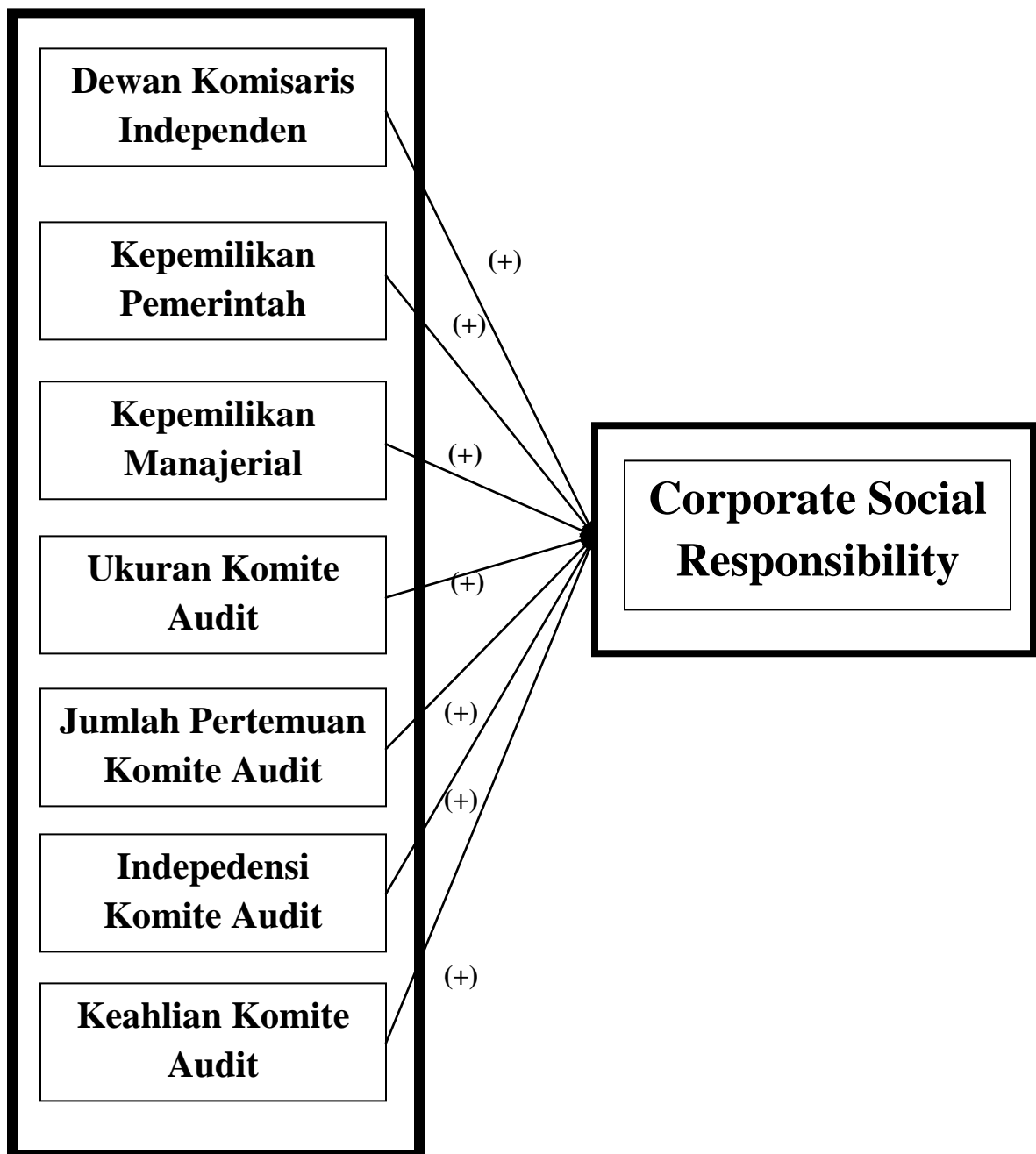
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H7 : Keahlian Komite Audit Berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2.1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen disini dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah Dewan komisaris independen, Kepemilikan pemerintah, Kepemilikan manajerial, Ukuran komite audit, Jumlah pertemuan komite audit, Independensi komite audit dan Keahlian komite audit. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*.

3.1.1 Variabel Dependen

Corporate Social Responsibility adalah variabel dependen yang akan digunakan pada penelitian ini. Pengukuran CSR diukur dengan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Dengan membagi seluruh total item yang diungkapkan perusahaan dengan total keseluruhan item mengacu pada GRI (3.1) sebanyak 75 item.

Pengukuran secara luas pada laporan yang tertera pada CSR dengan cara mengamati dengan ada tidaknya suatu item. Masing-masing item jika ada pada tiap indikator akan diberi skor 1, dan jika tidak diungkapkan pada laporan keuangan maka akan diberi nilai 0. Masing-masing indikator adalah lingkungan 30, tenaga kerja 15, hak asasi manusia 11, masyarakat 10, dan tanggung jawab produk 9.

Jumlah item yang di ungkapkan.

$$N = \frac{\text{Jumlah item yang di ungkapkan}}{75}$$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dari komisaris yang bukan berasal dari manajemen, pemegang saham atau orang yang masih berhubungan dengan pemegang saham atau manajemen di dalam perusahaan. Variabel ini diukur dengan proksi jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah total dewan komisaris dikali 100.

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jml Dewan komisaris independen}}{\text{Jml total dewan komisaris}} \times 100$$

3.1.2.2 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah total saham yang di miliki pemerintah dalam suatu perusahaan. Kepemilikan pemerintah dapat dihat jumlah total kepemilikan yang dimiliki oleh pemerintah. Presentase dari kepemilikan pemerintah dapat dilihat dengan total kepemilikan pemerintah dibagi dengan total jumlah saham yang beredar. Data tersebut dapat dilihat di laporan keuangan tahunan pada setiap tahunnya yang dipublikasikan oleh perusahaan.

3.1.2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan pihak-pihak yang langsung berhubungan dalam pembuatan keputusan perusahaan) terhadap jumlah total saham yang beredar Said *et, al.* (2009).

3.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah bagian dari corporate governance yang bertugas untuk membantu kinerja dari dewan komisaris. Keberadaan Komite Audit di Indonesia diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Tugas dari komite audit adalah pengendalian dan pengawasan dalam suatu perusahaan. Ukuran komite audit Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.5 Jumlah Pertemuan Komite Audit

Peran aktif komite audit dapat dilihat dari jumlah pertemuan yang digelar selama setahun. Pertemuan komite audit adalah jumlah pertemuan yang diadakan oleh anggota komite audit dalam setahun. Peran aktif anggota merupakan bagian paling penting pada efektivitas komite audit. Jumlah rapat komite audit pada

penelitian ini diukur berdasarkan jumlah total pertemuan yang dilakukan oleh komite audit yang diselenggarakan setiap tahunnya.

3.1.2.6 Independensi Komite Audit

Komite audit independen adalah syarat berjalannya kinerja yang efektif dari komite audit. Keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX 5 Tahun 2004, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua anggota luar emiten atau perusahaan publik. Variabel ini dihitung dengan menghitung jumlah anggota komite audit independen dibandingkan dengan jumlah total anggota komite audit.

3.1.2.7 Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit adalah kemampuan yang dimiliki anggota komite audit dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Dalam salah satu tugasnya yang tercantum dalam peraturan Bapepam No. IX 5 adalah menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan hal itu maka diperlukan keanggotaan komite audit setidaknya memiliki keahlian di bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Variabel ini dihitung dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan .

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 Untuk mempermudah penelitian ini maka menggunakan teknik *sampling* untuk pengambilan sampelnya.

3.2.2 Sampel

Metode pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tanggal pencatatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
2. Perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
3. Perusahaan manufaktur terdaftar yang memiliki kelengkapan informasi di *annual report* terkait dengan variabel penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pada periode 2012-2013 dan laporan lain yang relevan untuk digunakan dalam penelitian seperti laporan

annual report. Data-data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*, serta dari situs masing-masing perusahaan sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisa dari statistika deskriptif ini dapat memperlihatkan gambaran deskripsi suatu data. dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemelencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Tujuan dilakukannya statistika deskriptif memudahkan memahami variabel yang digunakan oleh penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2011).

Normalitas residual dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun, pengujian dengan melihat data histogram dapat menyesatkan khususnya untuk sampel kecil. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan melihat histogram residualnya (Ghozali, 2011).

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, di samping uji grafik perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Adapun dasar pengambilan keputusan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

- a. Nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas $< 0,05$ secara statistik H_0 ditolak maka distribusi adalah tidak normal.
- b. Nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas $> 0,05$ secara statistik H_0

diterima maka distribusi adalah normal.

Selain itu ditampilkan juga grafik normal *P-P Plot of regression standardized residual* untuk memperjelas hasil uji normalitas.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot model*. Dasar analisis heteroskedastisitas (Ghozali, 2011) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari hal berikut (Ghozali, 2011):

- a. Nilai R² yang dihasilkan dari suatu regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.9) maka mengindikasikan adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan dengan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linier ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa cara yang dipergunakan untuk mendeteksi autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji *Durbin Watson* (D-W test). Uji *Durbin Watson* banyak dipergunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan

mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi diantara variabel bebas, yang ditunjukkan dengan nilai *Durbin Watson* diantara nilai du dan $4-du$ ($du < dw < 4-du$) Ghozali (2011).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian lebih dari satu maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*). Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara *corporate social responsibility* dengan variabel-variabel independen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\text{CSR} = \alpha + \beta_1 \text{DKINPD} + \beta_2 \text{KP} + \beta_3 \text{KM} + \beta_4 \text{UKA} + \beta_5 \text{FREKKA} + \beta_6 \text{INDPKA} \\ + \beta_7 \text{PROFKA} + e$$

Keterangan :

CSR : Corporate Social Responsibility

α : Konstanta

β_1 DKINPD : Proporsi Dewan Komisaris Independen

β_2 KP : Proporsi Kepemilikan Pemerintah

β_3 KM : Proporsi Kepemilikan Manajerial

β_4 UKA : Jumlah Anggota Komite Audit

β_5 FREKKA : Proporsi Jumlah pertemuan Komite Audit

β_6 INDPKA : Proporsi Komite Audit Independen

β_7 PROFKA : Proporsi Ahli Keuangan dalam Komite Audit

e : Error

3.5.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independent (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, apabila $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen sedangkan jika $R^2=1$ berarti suatu hubungan yang sempurna. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan *adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasi (Ghozali, 2011).

3.5.3.2 Uji (t – Test)

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2011).

3.5.3.3 Uji (F – test)

Uji Statistik F dilakukan untuk menguji kemampuan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali,2011).